



KERTAS POSISI

Jurnalisme Kebencanaan di Era Krisis Iklim

Dari Liputan Peristiwa Menuju Tata Kelola Risiko, Keadilan Iklim, dan Hak Publik atas Informasi

Joni Aswira Putra

Ketua Umum SIEJ 2023–2026

Diskusi Meja Bundar Para Pakar — KK-AIPI, BPIP & Universitas Paramadina

Jakarta, 6 Juli 2026

Media Adalah Infrastruktur Sosial

Pengurangan Risiko Bencana

Sejajar pentingnya dengan sensor gempa, radar cuaca, dan jaringan BPBD — namun paling rapuh perlindungan kapasitas, hukum, dan kelembagaannya.



Sains → Publik

Menghubungkan data BMKG/BNPB dengan pengalaman hidup warga terdampak



Mengawasi Politik

Menguji keputusan yang memproduksi risiko: izin, tata ruang, status darurat



Menjaga Etika

Martabat korban tak boleh dikalahkan sensasi, bisnis, dan algoritma

Empat kepentingan ini saling terhubung — tanpa media yang berfungsi penuh, tata kelola risiko bencana Indonesia tidak lengkap.

Bencana Bukan Sekadar Peristiwa Cuaca

Indonesia punya kerangka kerja lengkap — UU 24/2007, InaTEWS, PVMBG 4-level, Destana, pentahelix. Tapi kelengkapan regulasi tidak otomatis jadi keselamatan warga.

Arsitektur yang Sudah Ada

- **UU 24/2007** Payung hukum BNPB (pusat) & BPBD (daerah)
- **InaTEWS (BMKG)** Target diseminasi peringatan tsunami < 5 menit
- **PVMBG 4-Level** Status gunung api: Normal–Waspada–Siaga–Awat
- **Destana & InaRISK** Desa Tangguh Bencana sejak 2012, peta risiko partisipatif
- **Pentahelix** Pemerintah–masyarakat–akademisi–usaha–media



Titik Lemah Konsisten

Bukan pada kemampuan deteksi — melainkan jarak antara deteksi ilmiah dan keputusan politik untuk bertindak.

“Dari segi deteksi, BMKG cukup mumpuni... kemampuan ini tidak diterjemahkan menjadi kemauan politik.”

— The Conversation Indonesia, 2025



Studi Kasus: Siklon Senyar & Banjir Sumatera 2025–2026

Siklon terdeteksi 8 hari sebelum dampak puncak — namun tidak diikuti eskalasi status kedaruratan yang terorganisasi.

8 hari

waktu deteksi dini Siklon Senyar
sebelum dampak puncak

1.100+

jiwa meninggal dunia; ratusan hilang,
ratusan ribu mengungsi

Rp68,67 T

estimasi kerugian ekonomi (hitungan
CELIOS)

137 ormas

melayangkan somasi ke Presiden
karena status bencana nasional tak
 kunjung ditetapkan

Bukan hanya siklon: gelondongan kayu — indikasi pembalakan liar bertahun-tahun — memperkuat argumen kerusakan diperparah deforestasi & lemahnya tata kelola perizinan. Video warga viral jauh sebelum informasi resmi menjangkau publik; pemetaan geospasial Auriga Nusantara & Earthsight ikut menekan pemerintah mengakui peran deforestasi dan berjanji audit lingkungan.

Problem Ganda: Krisis Jurnalisme & Krisis Komunikasi Negara



6 Problem Jurnalisme Kebencanaan

- ◆ Pemberitaan terlalu peristiwa-sentris
- ◆ Sumber resmi terlalu dominan
- ◆ Sains hadir sebagai angka, bukan penjelasan
- ◆ Bencana dipisahkan dari krisis iklim
- ◆ Logika algoritma melemahkan isu kompleks
- ◆ Keselamatan jurnalis belum jadi sistem



Pembatasan Negara — Sumatera, Des 2025

- ◆ Perampasan & penghapusan rekaman wartawan Kompas TV di Aceh (11 Des)
- ◆ Penghapusan konten CNN Indonesia — indikasi self-censorship
- ◆ Pernyataan pejabat (KSAD, Sekretaris Kabinet) meminta media tak soroti kekurangan pemerintah
- ◆ Indonesia peringkat 127/180 World Press Freedom Index 2025 (turun dari 111)
- ◆ 1.090 korban kriminalisasi pembela lingkungan 2014–2025 (Auriga)

Landasan Posisi: Empat Simpul yang Saling Terkait

Menuju istilah kerja baru: Jurnalisme Tata Kelola Risiko



Sains

Data BMKG/BNPB/BRIN/PVMBG diterjemahkan jadi narasi publik yang dapat dipakai warga



Politik

Jurnalisme menguji keputusan tata ruang, izin, status darurat — bukan sekadar mengutip pejabat



Etika

Martabat korban, persetujuan narasumber, kelompok rentan sebagai pemilik hak



Kelembagaan

Pentahelix sebagai checks and balances nyata, bukan forum seremonial

Jurnalisme yang menempatkan bencana sebagai persoalan untuk dicegah, dikurangi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan — sepanjang siklus risiko.

SIEJ: Posisi dan Praktik Kelembagaan



2006

Didirikan 45 jurnalis di Taman Nasional
Leuser, Hari Bumi 22 April 2006

25 cabang provinsi

500+ anggota aktif

Jurnalis lepas, media lokal, nasional, dan
alternatif

Green Editor Forum

Menyatukan editor lintas platform membahas isu terkini — seperti isu sawit, tambang, energi

Depati Project

Investigasi kolaboratif: PLTA Batang Toru (2023), deforestasi Kalbar (2024), Sipora Mentawai (2025)

Ekuatorial.com

Platform geojurnalisme

Investigasi + Jurnalisme Konstruktif

Dua sayap saling melengkapi — bongkar akar masalah, tawarkan solusi lokal

Peran Media Sepanjang Siklus Bencana



Sebelum

Literasi risiko, uji kesiapan pemerintah daerah, awasi izin & anggaran mitigasi



Saat Bencana

Info penyelamatan terverifikasi, lawan hoaks, jangkau wilayah 3T



Setelah

Awasi bantuan, rekonstruksi, akuntabilitas status bencana



Risiko Lambat

Kekeringan, panas ekstrem, abrasi — mengubah hidup warga perlahan

Prinsip integrasi: media lokal, radio komunitas, dan jaringan jurnalis daerah harus jadi bagian rantai peringatan dini formal — melengkapi SMS Blast & EWS TV Digital BMKG yang jangkauannya masih terbatas di wilayah konektivitas rendah.

Apa yang Harus Kita Lakukan

Rekomendasi lintas pemangku kepentingan — bukan sekadar teknologi, tapi reformasi tata kelola menyeluruh



Pemerintah

Buka data risiko; jernihkan kriteria status bencana nasional; hentikan perampasan alat kerja jurnalis



BNPB/BMKG/PVMBG

Percepat Impact-Based Forecasting; sediakan daftar ahli cepat akses; investasi konektivitas satelit



Perusahaan Media

Bentuk disaster & climate beat permanen; lindungi jurnalis lapangan; adopsi pedoman peliputan bencana



Masyarakat Sipil

Dukung hibah liputan tanpa intervensi editorial; kuatkan basis data pembela lingkungan



SIEJ & Komunitas Jurnalis

Bangun Protokol Jurnalisme Kebencanaan; bentuk Climate & Disaster Media Desk; perluas Ekuatorial



Bencana iklim tidak boleh lagi diperlakukan sebagai berita musiman. Ia adalah cermin dari kualitas tata kelola pembangunan, keterbukaan data, perlindungan ekosistem, dan keberpihakan negara kepada warga yang paling rentan.

Media harus berada di antara sains dan publik, tetapi juga harus berani menguji keputusan politik yang memproduksi risiko.

— Rumusan Posisi SIEJ

Jurnalisme adalah bagian tak terpisahkan dari sistem keselamatan publik — penjaga hak publik atas informasi, penghubung sains dengan warga, penggerak akuntabilitas ekologis.